

Menelisik Peran Kurikulum dalam Pendidikan: Menciptakan Agen Pengetahuan atau Menciptakan Subjek Pekerja

Carolina Pusparani¹, Sarlin Ampuno², Tresia Siitay³

^{1,2,3}Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

Email: carolinapusparani98@gmail.com¹, sarlien16ampuno@gmail.com²,
theresiaitay02@gmail.com³

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran kurikulum dalam pendidikan apakah menciptakan subjek pengetahuan atau justru menciptakan subjek pekerja. Tulisan ini hendak mengembalikan kesadaran masyarakat akan fungsi pendidikan sebenarnya, yaitu untuk memperoleh pengetahuan guna terlibat dalam dialog-dialog kemasyarakatan, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan buku dan artikel jurnal terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, konstruksi sosial dalam kurikulum merdeka, dan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi akan subjek pekerja. Kesimpulan dari tulisan ini menjelaskan bahwa pendidikan tidak sekadar untuk mempersiapkan subjek pekerja, melainkan subjek pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai dasar pelaksanaan pendidikan harus dapat membedakan antara mengajarkan pengetahuan agar siswa dapat terlibat dalam dialog kemasyarakatan. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses pengetahuan, sehingga pendidikan tidak seharusnya mendukung praktik kapitalisme yang mengontrol aktivitas dan kedirian individu berdasarkan kekuatan mereka akan sistem ekonomi.

Kata kunci: Kurikulum, Pendidikan, Pengetahuan, Pekerja

Pendahuluan

Masa-masa pergantian Presiden Indonesia menjadi peristiwa penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan reaksi yang beragam, mulai dari memberikan dukungan maupun mencari celah kesalahan untuk selanjutnya dijatuhkan. Selain pergantian kepemimpinan presiden, pergantian kepemimpinan pada tingkat kementerian juga menjadi hal yang menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh kelompok masyarakat tertentu. Para guru mulai dari jenjang SD, SMP bahkan SMA sangat mengharapkan adanya pergantian kepemimpinan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada masa pemerintahan yang baru ini kementerian tersebut dipecah menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian



Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.

Pergantian kepemimpinan pada Kementerian Pendidikan turut memunculkan pertanyaan berkaitan dengan keberlanjutan penerapan Kurikulum Merdeka. Pergantian kurikulum berarti akan mengubah proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri, karena proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada kurikulum pendidikan. Berdasarkan maknanya, kurikulum dalam pendidikan berperan untuk mempromosikan pengetahuan sebagai produk belajar yang lebih baik guna mendukung adanya kesetaraan sosial (Wheelahan, 2010). Wheelahan (2010) juga menjelaskan bahwa kurikulum dalam pendidikan penting untuk berfokus pada pengetahuan, yang mana pengetahuan tersebut diintegrasikan dalam kontekstual kehidupan siswa sehari-hari agar pendidikan yang dilaksanakan lebih efektif dalam mempromosikan kesetaraan sosial.

Oleh karena kurikulum harus berfokus pada pengetahuan, maka idealnya kurikulum berperan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dunia di sekitar mereka menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Pengetahuan tersebut akan bermanfaat bagi siswa agar dapat terlibat dalam dialog masyarakat. Pengetahuan digunakan sebagai pemantik dalam dialog tersebut. Apabila siswa tidak memiliki pengetahuan, maka akan mengalami kesulitan untuk terlibat dalam dialog-dialog kemasyarakatan karena tidak memiliki dasar untuk memantik pembicaraan. Pengetahuan adalah hal yang esensial bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang berguna untuk memahami dunia di sekitar mereka (Wheelahan, 2010).

Kurikulum sejatinya mampu memberikan pengetahuan kepada siswa sebagai bentuk komitmen untuk kemudahan memperoleh akses terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, mencapai kesetaraan dan distribusi kesempatan hidup (Wheelahan, 2010). Akan tetapi, fungsi kurikulum masa kini seakan mengalami pergeseran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya praktik penerapan kurikulum di sekolah-sekolah ternyata justru menolak akses siswa terhadap pengetahuan kontekstual dan akses terhadap dialog-

dialog masyarakat. Belajar sejatinya bersifat kontekstual dan situasional, yaitu sesuai dengan tempat dan kondisi di mana pengetahuan tersebut diajarkan (Wheelahan, 2010), dengan begitu siswa semakin mudah untuk melibatkan dirinya dan berkontribusi dalam dialog sosial. Oleh karena itu, penting bagi guru, sekolah dan siswa untuk memahami pengetahuan sebagai pengetahuan itu sendiri.

Pada masa kini, masyarakat pengetahuan telah tergantikan dengan masyarakat teori yang ditunjukkan dengan kurikulum pendidikan saat ini justru mempersiapkan siswa hanya sekadar untuk memasuki dunia kerja. Siswa dibekali dengan keterampilan-keterampilan spesifik yang dibutuhkan pekerjaan tertentu, tetapi bukan untuk turut terlibat dalam dialog kemasyarakatan (Wheelahan, 2010). Fungsi pendidikan yang seharusnya menciptakan subjek pengetahuan, kini beralih fungsi untuk menciptakan subjek pekerja. Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan saat ini cenderung berfokus untuk memberikan pengetahuan terkait kompetensi-kompetensi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi terkait tenaga kerja. Pendidikan saat ini seakan hanya untuk memenuhi kebutuhan prospek kerja yang dibutuhkan.

Penjelasan di atas bermakna bahwa pendidikan saat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia kapitalis terkait mempersiapkan para pekerja, sedangkan pendidikan tidak hanya sebatas pada untuk mencari pekerjaan. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya wacana pemerintah yang hendak memosisikan jurusan atau spesialisasi ilmu tertentu lebih diutamakan daripada jurusan lainnya. Misalnya, wacana pemerintah untuk lebih memprioritaskan jurusan saintek dalam memperoleh beasiswa pendidikan daripada jurusan soshum (Buwana, 2024). Wacana tersebut didasarkan pada meningkatnya kebutuhan dunia kerja terhadap profesional dibidang sains, seperti dokter hingga ilmuwan. Wacana tersebut seakan mendukung bahwa pendidikan tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan agar dapat terlibat dalam dialog kemasyarakatan, melainkan untuk bersiap mencari pekerjaan dan mendukung praktik kapitalisme.

Ketika fungsi kurikulum dalam pendidikan mengalami pergeseran, maka keterlibatan siswa turut mengalami pergeseran dalam menjalankan

pendidikan tersebut (Marhamah & Zikriati, 2024). Siswa akan mengalami alienasi atau keterasingan dari proses pendidikan yang dialami. Alienasi adalah kondisi ketika manusia dijauhkan atau menjauhkan diri dari sesuatu, sesama manusia, alam, budaya atau bahkan dirinya sendiri (Burston, 2014). Gejala alienasi yang paling menonjol dalam pelaksanaan pendidikan adalah siswa cenderung menunda pekerjaan rumah, sehingga siswa dipandang malas karena menunda pekerjaan. Hal tersebut dipersulit dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan guru memberikan tugas menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada. Siswa menunda pekerjaan bukan dikarenakan malas, melainkan adanya ketidaksetaraan antara guru dan siswa dalam memberikan tugas-tugas tersebut. Setiap guru hanya memberikan satu tugas kepada siswa, sedangkan siswa menerima tugas dari guru yang berbeda-beda. Ketidaksetaraan tersebut menjadikan siswa akhirnya teralienasi dari tujuan utama pendidikan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan karena siswa belajar hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Siswa belajar hanya untuk menyelesaikan tugas, memperoleh nilai, mengikuti ujian dan lulus sekolah.

Berdasarkan penjabaran di atas terkait kurikulum dalam pendidikan, penerapan yang seharusnya hingga fakta yang ada di lapangan, maka tulisan ini hendak mengarahkan kembali fungsi kurikulum dalam pendidikan pada jalur yang sebenarnya. Kurikulum sejatinya dapat menciptakan individu yang berpengetahuan kontekstual agar dapat terlibat aktif dalam dialog kemasyarakatan dan bukan hanya sebagai mempersiapkan subjek pekerja.

Untuk mendukung hal tersebut, maka kurikulum sebagai landasan pelaksanaan proses pendidikan penting untuk mengikutsertakan konteks dalam proses belajar siswa. Kurikulum dalam pendidikan harus mulai memperhitungkan ideologi kontekstual daripada ideologi dominan dalam pendidikan. Hal tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, melihat Indonesia yang memiliki sangat banyak konteks, seperti budaya, masyarakat hingga bahasa. Oleh karena itu, tantangan kurikulum dalam pendidikan masa kini adalah memberikan pendidikan yang mampu

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan identitasnya . Hal tersebut menjadi penting karena dalam pendidikan cenderung menggunakan ideologi dominan yang seakan harus diikuti oleh semua orang. Apabila harus mengikuti sesuatu yang lebih dominan, maka pengembangan identitas dalam pendidikan akan sulit untuk dicapai.

Hal tersebut yang disebut oleh Paulo Freire sebagai pendidikan gaya bank. Freire (2000), menjelaskan bahwa pendidikan gaya bank cenderung mendikotomikan segala sesuatu, dengan kata lain menggunakan ideologi dominan. Konsep pendidikan ini cenderung mengekang potensi kreatif siswa dan justru menghambat siswa untuk berpikir kritis. Seperti penjelasan sebelumnya di atas bahwa pendidikan masa kini seakan mendukung praktik kapitalisme, maka pendidikan gaya bank inilah yang turut mendukung praktik-praktik penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Pihak yang berkuasa menggunakan “kemanusiaan” untuk mengklaim bertindak demi kebaikan, yang sebenarnya untuk mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka. Hal tersebut menjadikan penguasa berusaha menekan upaya-upaya pendidikan yang dapat membebaskan siswa untuk berpikir dan bertindak secara kritis demi perubahan sosial (Freire, 2000).

Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan subjek pengetahuan yang kontekstual, maka siswa harus turut serta melibatkan diri secara penuh dalam proses pendidikan. Peran guru dalam menghadirkan pendidikan kontekstual juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut sejalan dengan konsep belajar *problem-posing* yang dikemukakan oleh Freire (2000), bahwa konsep belajar *problem-posing* merupakan konsep pendidikan berbasis pengajuan masalah. Konsep pendidikan ini tidak hanya mengandalkan guru sebagai sumber utama pengetahuan melainkan membangun dialog pengetahuan antara guru dan siswa. Peran siswa harus lebih besar daripada guru, sehingga siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam memperoleh pengetahuan. Melalui konsep pendidikan ini, guru dan siswa bersama-sama terlibat dalam pemikiran kritis yang membatasi kebebasan berpikir yang akhirnya mengatasi keterasingan guru dan siswa dari kenyataan kehidupan pengetahuan mereka (Freire, 2000).

Berdasarkan ulasan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran kurikulum dalam pendidikan apakah menciptakan subjek pengetahuan atau justru menciptakan subjek pekerja. Tulisan ini hendak mengembalikan kesadaran masyarakat akan fungsi pendidikan sebenarnya, yaitu untuk memperoleh pengetahuan guna terlibat dalam dialog-dialog kemasyarakatan.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dokumen sebagai alat pengumpul data. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan buku dan artikel jurnal terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, konstruksi sosial dalam kurikulum merdeka, dan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi akan subjek pekerja. Setelah data terkumpul penulis akan melakukan analisis data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan tujuan dari penulisan artikel ini.

Pembahasan

A. Penerapan Kurikulum dalam Konteks Pembebasan Belajar dan Otonomi Siswa

Penerapan kurikulum dalam konteks pembebasan belajar dan otonomi siswa merupakan salah satu isu yang sangat relevan dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam menghadapi tuntutan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis semata, tetapi juga keterampilan hidup yang dibutuhkan di dunia yang terus berubah (Ayunda et.al., 2024). Oleh karena itu konsep kurikulum berbentuk pembebasan belajar dan otonomi siswa, serta pengembangan potensi secara menyeluruh menjadi sangat penting bagi siswa di dunia pendidikan formal saat ini (Efendi et.al., 2024). Berdasarkan Susilo et al (2024), adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menghargai keberagaman siswa, yang di mana dalam hal ini siswa memiliki cara dan kecepatan yang berbeda, sehingga kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing siswa.

2. Meningkatkan keterlibatan siswa, yang di mana dalam hal ini ketika siswa memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang ingin dipelajari, siswa akan cenderung lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran
3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang di mana dalam hal ini pembebasan belajar memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman, refleksi dan pemecahan masalah yang melatih dan memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pembebasan belajar pada siswa adalah sebuah pendekatan yang memberikan kebebasan untuk memilih, mengeksplorasi, dan menata pembelajarannya sendiri. Dalam hal ini, kurikulum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan seragam, akan tetapi lebih fleksibel dan dapat memungkinkan siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa (Maharani et al., 2023). Dalam konteks tersebut, kurikulum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan seragam. Hal ini sejalan dengan program kurikulum merdeka belajar, di mana memberikan keleluasaan pada guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Adapun karakteristik utama dari kurikulum merdeka belajar adalah (Mahmudah, 2023):

1. Pengembangan soft skills dan karakter, yaitu pembelajaran berbasis proyek di mana dalam hal ini materi yang dibahas berdasarkan isu-isu yang ada di sekitar siswa serta apa yang dipelajari selama proses pembelajaran.
2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Guru dapat merancang asesmen awal untuk mengukur kesiapan siswa
4. Siswa dapat melakukan refleksi belajar untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya dan apa yang perlu dipertahankan atau dikuasai.
5. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

6. Guru perlu terus melatih diri dalam menggunakan metode pembelajaran yang baru dan efektif.

Karakter kurikulum merdeka belajar tersebut memiliki kesamaan dengan konsep pemikiran pendidikan Paulo Freire tentang pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dapat dilihat dari persamaan tujuan yaitu humanisasi yang dilakukan untuk memberikan kebebasan berpendapat dan berpikir dalam proses belajar, yang di mana pada titik ini pendidikan harus mampu membawa manusia pada kemerdekaan lahir dan batin. Paulo Freire dalam teorinya mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga tentang pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan realita yang ada dan berpikir aktif dalam perubahan sosial (Freire, 2000).

Pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, akan tetapi juga sebagai proses yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara bebas dan kritis. Dalam hal ini pendidikan berfungsi untuk membebaskan siswa dari keterbatasan berpikir yang dipaksa oleh sistem otoriter. Dengan demikian, baik guru maupun siswa terlibat dalam refleksi dan dialog yang saling menguntungkan, yaitu keduanya bisa saling belajar satu sama lain, guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga membuka ruang untuk pembelajaran timbal balik yang memungkinkan pengembangan pemikiran kritis bagi kedua belah pihak (Freire, 2000).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran kurikulum dalam konteks pembebasan belajar dan otonomi siswa dapat berfungsi sebagai alat untuk membebaskan siswa dari cara belajar yang kaku dan otoriter, serta memberikan kebebasan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Kurikulum yang mendukung pembebasan belajar dan otonomi siswa memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat dalam proses belajar yang lebih partisipatif, di mana mereka dapat memilih topik atau cara belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya menjadi panduan yang harus diikuti, tetapi juga menjadi sarana yang mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran

mereka sendiri, berpikir secara independen, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

B. Konstruksi Sosial dalam Kurikulum Pendidikan

konstruksi sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah hasil dari konstruksi manusia. Dalam hal ini Konstruksi sosial merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, objektifikasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilambungkan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial yang di mana individu menjadi anggotanya, dalam hal ini konsep konstruksi sosial, manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial (Putra, 2022).

Dalam kaitannya dengan konstruksi sosial dalam kurikulum pendidikan adalah merujuk pada cara-cara di mana pengetahuan, nilai, norma, dan pemahaman dibentuk, diajarkan, dan diterima melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam dunia pendidikan, konstruksi sosial mengacu pada bagaimana kurikulum, pedagogi, dan praktik pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi atau keterampilan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan pandangan dunia dibangun dalam konteks sosial, budaya, dan politik tertentu (Putra, 2022).

Kurikulum dalam pendidikan bukan hanya sekadar daftar materi atau keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa, tetapi juga merupakan suatu konstruksi sosial yang memuat nilai, norma, dan cara pandang tertentu terhadap dunia. Kurikulum mencerminkan pilihan-pilihan tentang pengetahuan apa yang penting untuk dipelajari dan mengapa hal tersebut dianggap penting dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Beberapa aspek yang membentuk kurikulum sebagai konstruksi sosial adalah (Sugrah, 2019):

1. Pemilihan materi dan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang dimasukkan dalam kurikulum adalah hasil dari konsensus sosial dan

keputusan politik. Misalnya, apa yang dianggap penting untuk dipelajari, siapa yang menentukan apa yang dianggap benar dan penting, serta bagaimana suatu materi disampaikan bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan politik.

2. Penyampaian nilai dan ideologi, dalam hal ini kurikulum sering kali menyampaikan nilai-nilai budaya tertentu yang dimiliki oleh masyarakat atau negara. Sebagai contoh, pengajaran tentang nilai kebebasan, demokrasi, atau kerja sama sering kali menjadi bagian dari kurikulum yang bertujuan membentuk identitas sosial dan moral siswa.
3. Struktur dan organisasi kurikulum, seperti Bagaimana kurikulum disusun misalnya, mata pelajaran, urutan pembelajaran, atau penilaian sering kali mencerminkan nilai-nilai dan tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga proses sosial yang membentuk siswa sebagai bagian dari masyarakat.

Selain kurikulum itu sendiri, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas juga merupakan bagian dari proses konstruksi sosial. Interaksi antara guru, siswa, serta sesama siswa dalam kegiatan pembelajaran membentuk cara siswa memahami dan merefleksikan dunia. Menurut (Sulaiman, 2016), terdapat beberapa aspek yang terkait dengan konstruksi sosial dalam pembelajaran, yaitu:

1. Interaksi sosial dalam kelas, dalam hal ini proses belajar tidak terjadi dalam isolasi, tetapi melibatkan interaksi sosial yang membentuk pengetahuan. Diskusi, debat, kolaborasi, dan bahkan perbedaan pendapat di kelas berperan dalam bagaimana siswa membangun pemahaman mereka tentang suatu topik atau isu.
2. Peran guru dalam konstruksi pengetahuan, dalam hal ini guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka. Guru dapat membimbing siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, serta mengajak mereka melihat berbagai perspektif dalam memahami pengetahuan.
3. Pengaruh budaya dan sosial, dalam hal ini kelas sebagai lingkungan sosial yang dibentuk oleh budaya lokal dan nilai-nilai sosial,

mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan mengkonstruksi pengetahuan. Misalnya, di beberapa budaya, cara-cara berbicara dan berpikir yang lebih hierarkis mungkin lebih dihargai, sedangkan di budaya lain, pendekatan lebih egaliter dan terbuka lebih dihargai.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran adalah interaktif dan sosial, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka, sementara interaksi sosial antara siswa memperkaya pemahaman mereka. Selain itu, budaya dan konteks sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana siswa berpartisipasi dalam kelas dan bagaimana mereka memahami pengetahuan yang diajarkan. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhitungkan keberagaman sosial dan budaya siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna.

C. Bergesernya Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi akan Subjek Pekerja

Pendidikan sejatinya bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan guna melibatkan diri dalam dialog-dialog yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai pusat pelaksanaan pendidikan harus menjamin siswa dalam memperoleh akses terhadap pendidikan. Akan tetapi, proses pendidikan saat ini justru menutup akses siswa untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan sistem pendidikan di sekolah yang seakan hanya membekali siswa dengan kompetensi-kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia pekerjaan di masa depan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh adalah hasil dari konstruksi sosial yang akhirnya berdampak pada proses masyarakat untuk memproduksi pengetahuan (Wheelahan, 2010). Pengetahuan yang diproduksi saat ini cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan para penguasa terkait tenaga kerja. Penjelasan tersebut sejalan dengan konsep Marxisme yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi akhirnya memengaruhi cara individu berpikir, yang disebut sebagai ekonomisme. Ekonomisme adalah proses menciptakan individu

hanya berdasarkan kebutuhan ekonomi tertentu (Morss, 1996), yang akhirnya proses pendidikan cenderung hanya menyalurkan pengetahuan yang spesifik dibutuhkan di dunia kerja.

Melihat pada fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya universitas di Indonesia yang berlomba-lomba untuk membuka jurusan dan spesialisasi ilmu baru. Diketahui beberapa universitas kini memprioritaskan jurusan ilmu sains dengan membuka jurusan kedokteran. Sejauh ini, sudah terdapat 12 institusi pendidikan tinggi yang telah membuka Fakultas Kedokteran (Mochtar, 2023). Hal tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia yang mana bidang kesehatan atau biomedis kerap menjadi topik penelitian terbanyak (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, maraknya pembukaan jurusan kedokteran dipicu oleh narasi Kementerian Kesehatan tahun 2022, bahwa Indonesia mengalami defisit darurat dokter (Mochtar, 2023), ditambah dengan banyaknya dokter yang cenderung bertugas di daerah-daerah utama di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan memerintahkan institusi pendidikan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa mereka. Mochtar (2023) juga menambahkan bahwa maraknya pembukaan Fakultas Kedokteran tentu akan memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Selain jurusan kedokteran, terdapat pula jurusan-jurusan lainnya yang marak dibuka oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia untuk menjawab kebutuhan ekonomi akan tenaga kerja. Fungsi pendidikan saat ini layaknya fungsi ekonomi terkait *supply and demand*.

Maraknya pembukaan jurusan pendidikan baru di Indonesia juga memunculkan pertanyaan baru terkait dengan kualitas lulusannya. Institusi pendidikan tinggi seakan hendak mengejar keuntungan tertentu dengan beramai-ramai membuka jurusan maupun spesialisasi ilmu baru tanpa diikuti dengan pengawasan terhadap kualitas lulusannya. Hal ini ditunjukkan dengan ditingkatkannya kuota penerimaan mahasiswa tanpa mempertimbangkan tenaga pengajar yang tersedia. Kuota mahasiswa yang sangat banyak, tetapi tidak diimbangi dengan tenaga pengajar akan memengaruhi proses pembelajaran yang akan berdampak juga pada kualitas lulusan.

Ketika pendidikan saat ini menjadi proses mempersiapkan subjek pekerja, maka siswa akan terasingkan dari proses belajar itu sendiri. Keterasingan atau alienasi adalah konsekuensi yang muncul dari adanya eksploitasi sistem ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis (Hayes, 2004). Pendidikan yang dijalankan oleh siswa tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan, tetapi sekadar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, lalu memperoleh nilai dan akhirnya dapat dinyatakan lulus. Fenomena alienasi lainnya yang juga terjadi dalam dunia pendidikan dialami oleh mahasiswa, yaitu adanya standar kebahagiaan bahwa kelulusan yang baik harus menerima predikat cumlaude dengan IPK 4,00. Selain itu, adanya pandangan bahwa dengan predikat cumlaude akan lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh IPK yang baik, karena mahasiswa berpandangan bahwa menyelesaikan tugas hanya untuk memperoleh gelar akademik yang nantinya akan digunakan untuk melamar pekerjaan. Pengetahuan tidak lagi menjadi utama, sehingga minat untuk berdialog dalam masyarakat menjadi berkurang.

Selain fenomena tersebut, berkaitan dengan akses terhadap pendidikan dan pengetahuan juga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Paham Marxisme berpandangan bahwa tidak adanya kebebasan dan kesetaraan yang nyata. Kebebasan dan kesetaraan adalah ilusi yang merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh kaum kapitalis dan diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai pengendali seluruh aktivitas mereka (Morss, 1996). Hal tersebut tentu bertujuan untuk menguntungkan para kapitalis. Oleh karena itu, wacana bahwa individu memperoleh kebebasan dan kesetaraan dalam mengakses pengetahuan dan pendidikan hanyalah ilusi belaka. Hal yang paling menonjol untuk menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam mengakses pendidikan dan pengetahuan adalah perbedaan kondisi ekonomi (Morss, 1996). Ketidakadilan tersebut tersistematisasi seakan terjadi secara alamiah dan diterima begitu saja oleh masyarakat.

D. Mengembalikan Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan untuk Menciptakan Subjek Pengetahuan

Bernstein (2000) dalam Wheelahan (2010), menjelaskan bahwa cara pengetahuan diproduksi juga memiliki implikasi terhadap bagaimana pengetahuan itu direproduksi dalam kurikulum pada level pendidikan. Hal tersebut untuk mengetahui dasar perbandingan antara pengetahuan teoretis dan pengetahuan sehari-hari. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap peran masing-masing pengetahuan dalam kehidupan masyarakat (Wheelahan, 2010), dikarenakan pengetahuan adalah produk dari konstruksi sosial.

Berdasarkan analisis pengetahuan Bernstein (2000) dalam Wheelahan (2010), terdapat dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan esoterik dan pengetahuan mundane. Pengetahuan esoterik adalah pengetahuan konseptual yang merupakan hasil representasi kolektif terhadap pengalaman masyarakat. Representasi tersebut menghasilkan pengetahuan kontekstual dan teoretis. Sedangkan pengetahuan mundane adalah pengetahuan sehari-hari yang hanya akan dipahami dalam konteks tertentu di mana pengetahuan tersebut dibangun.

Kedua pengetahuan tersebut terbentuk dari dua wacana yang berbeda. Pengetahuan esoterik terbentuk dari wacana vertikal, yaitu hierarkis, sistematis dan cenderung kaku karena diturunkan secara langsung dari tingkatan tertinggi penyusunnya untuk diterapkan dalam proses pendidikan (Bernstein, 2000 dalam Wheelahan, 2010). Pengetahuan esoterik layakanya kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan lalu diturunkan untuk diterapkan dalam proses pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Berbeda dengan pengetahuan esoterik, pengetahuan mundane terbentuk dari wacana horizontal, yaitu spesifik mengikuti konteks di mana pengetahuan tersebut diproduksi. Wacana horizontal lebih lokal, unik dan otentik. Hal tersebut menjadikan makna pengetahuan mundane atau pengetahuan sehari-hari akan berbeda-beda tergantung konteksnya. Perbedaan tersebut yang menjadikan pengetahuan esoterik cenderung lebih mudah untuk digunakan dalam berbagai konteks, tetapi tidak dengan pengetahuan mundane (Wheelahan, 2010).

Penjelasan di atas oleh Bernstein (2000) dalam Wheelahan (2010), hendak menegaskan bahwa implikasi kurikulum dalam pendidikan adalah memastikan siswa memiliki akses terhadap pengetahuan yang mendukungnya untuk mengakses pengetahuan lain yang lebih kuat. Kurikulum harus dapat membantu siswa untuk mencapai kapasitasnya dalam mengenali batasan-batasan antara berbagai macam pengetahuan yang berbeda. Selain itu, kurikulum harus membantu siswa untuk memahami makna pengetahuan tersebut selama proses belajar di sekolah hingga akhirnya siswa terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, harus ada pembedaan pengajaran di dalam kurikulum antara pengetahuan konseptual dan pengetahuan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan perbedaan struktur pengetahuan membutuhkan perbedaan spesifik pada kurikulum yang digunakan (Muller, 2006 dalam Wheelahan, 2010). Penting untuk diperhatikan bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk melawan keberadaan relasi kekuasaan jika pengetahuan tersebut tertanam secara benar dan kuat dalam sosial (Wheelahan, 2010). Pengetahuan dapat digunakan untuk mengakses banyak hal serta memahami bagaimana dunia ternyata dikonstruksikan, perkembangan dunia hingga bagaimana dunia dapat berubah (Wheelahan, 2010). Oleh karena itu, proses pendidikan harus berjalan dengan benar didasarkan pada kurikulum yang harus benar dan memastikan adanya perolehan pengetahuan. Memiliki akses terhadap pengetahuan adalah dasar untuk mencapai keadilan yang merata.

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang diangkat, tulisan ini hendak menyadarkan kembali seluruh aspek masyarakat terkait tujuan utama dari pendidikan, yaitu memastikan bahwa siswa memperoleh akses terhadap pengetahuan. Memperoleh akses terhadap pengetahuan adalah dasar untuk melawan tindakan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh para kaum kapitalis. Tulisan ini hendak menyadarkan bahwa pendidikan bukanlah sistem *supply and demand*. Pendidikan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan tenaga kerja di masa

depan. Pendidikan tidak sekadar untuk mempersiapkan subjek pekerja, melainkan subjek pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai dasar pelaksanaan pendidikan harus dapat membedakan antara mengajarkan pengetahuan agar siswa dapat terlibat dalam dialog kemasyarakatan. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses pengetahuan, sehingga pendidikan tidak seharusnya mendukung praktik kapitalisme yang mengontrol aktivitas dan kedirian individu berdasarkan kekuatan mereka terhadap sistem ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ayunda, V., Jannah, A. M., & Gusmaneli, G. (2024). Metode Pembelajaran yang Efektif dalam Pendidikan Dasar. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 259-273.
- Burston, D. (2014). Alienation. In Thomas Teo (Eds.), *Encyclopedia of critical psychology* (Vol. 1, pp. 76-82). Springer.
- Buwana, Y. F. (2024, November 10). Kalau LPDP cuma fokus ke rumpun saintek, orang soshum sebaiknya nggak usah protes. *Mojok*. <https://mojomok.co/terminal/lpdp-fokus-saintek-yang-soshum-nggak-usah-protes/>
- CNN Indonesia. (2023, Agustus 4). Fenomena kampus marak buka fakultas kedokteran baru. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230803145230-20-981526/fenomena-kampus-marak-buka-fakultas-kedokteran-baru>
- Efendi, S., Ramli, R., & Zulhendra, D. (2024). Strategi Pengembangan Profesionalisme Pendidik di Era Digital. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 1(1), 53-66.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hayes, G. (2004). Marxism and critical psychology. In Derek Hook et al (Eds.), *Critical psychology* (pp.162-186). University of Cape Town Press.
- Hook, D. W., Kiguwa, P., Mkhize, N. J., & Collins, A. (2004). *Critical psychology*. University of Cape Town Press.
- Maharani, S. P., Tsuraya, F. G., Arahra, S., & Azzahra, N. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam sekolah penggerak. *Dahlia*:

- Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 34-43.
<https://doi.org/10.572349/dahlia.v1i1.474>
- Mahmudah, M. (2023). Peningkatan soft skill dalam implementasi kurikulum merdeka. *Tarunaedu: Journal of Education and Learning*, 1(1), 32-45. <https://doi.org/10.54298/tarunaedu.v1i1.122>
- Marhamah, M., & Zikriati, Z. (2024). Mengenal Kebutuhan Peserta Didik Diera Kurikulum Merdeka. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 89-106.
- Mochtar, I. (2023, September 7). Utak-atik sekolah dokter. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/06/utak-atik-sekolah-dokter>
- Morss, J. R. (1996). *Growing critical: Alternatives to developmental psychology*. Routledge.
- Putra, M. N. (2022). Konstruksi sosial guru pada tematik kurikulum 2013 SD Banda Aceh. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(2), 841-850.
- Sugrah, N. U. (2019). Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran sains. *Jurnal Humanika*, 19(2), 121-138. <https://doi.org/10.21831/hum.v19i2.29274>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Jurnal Society*, 6(1), 15-22.
- Susilo, J., Cipwati, A., Cahyaningrum, M. P., & Sari, N. K. (2024). Pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi produk berdasarkan gaya belajar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 12009-12016. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.33255>
- Wheelahan, L. (2010). *Why knowledge matters in curriculum: A social realist argument*. Routledge.